



# RENCANA KERJA

## INSPEKTORAT DAERAH

# TAHUN 2022

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

---

DISUSUN TAHUN 2021



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 32 TAHUN 2021  
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dari pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II MAKSUD RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk priode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir 31 Desember 2022.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
  - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2022.
  - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2022.
  - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022; atau
  - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022.

### Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Terdiri atas :

- a. Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN	
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V	:	PENUTUP	

- b. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
2. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
3. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
4. Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
5. Lampiran V Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
6. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
7. Lampiran VII Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
8. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
9. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
10. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
11. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
12. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
13. Lampiran XIII Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
14. Lampiran XIV Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;

15. Lampiran XV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
16. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
17. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
18. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
19. Lampiran XIX Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
20. Lampiran XX Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
21. Lampiran XXI Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
22. Lampiran XXII Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
23. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
24. Lampiran XXIV Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
25. Lampiran XXV Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
26. Lampiran XXVI Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
27. Lampiran XXVII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
28. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
29. Lampiran XXIX Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
30. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Pondok Sugh Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
31. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
32. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
33. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
34. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
35. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
36. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;

37. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
38. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
39. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
40. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
41. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
42. Lampiran XLII Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.

#### Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2022, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.

#### Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

#### Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu yang di anggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2022, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.



BAB III  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 10 September 2021  
BUPATI MUKOMUKO,



Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJCHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 32

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Inspektorat Daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan serta target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2022 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai mana diatur dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Oleh karenanya, dokumen ini sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2022, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahun selanjutnya, terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Aparatur Inspektorat Daerah.





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1    Latar Belakang.....	I-1
1.2    Landasan Hukum.....	I-3
1.3    Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4    Sistematika Penyusunan.....	I-6
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU (2020).</b>	II-1
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu (2020) dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	II-1
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	II-7
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	II-13
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-15
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-20
<b>BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	III-1
3.1    Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah.....	III-2
3.3    Program dan Kegiatan.....	III-3
3.3.1    Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	III-3
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022</b> .....	IV-1
<b>BAB V     PENUTUP</b> .....	V-1

## DAFTAR GAMBAR

1	<b>Gambar 1.2</b>	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur Perencanaan Pembangunan Daerah UU 25/2004.....	I-3
---	-------------------	--	-----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan Memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

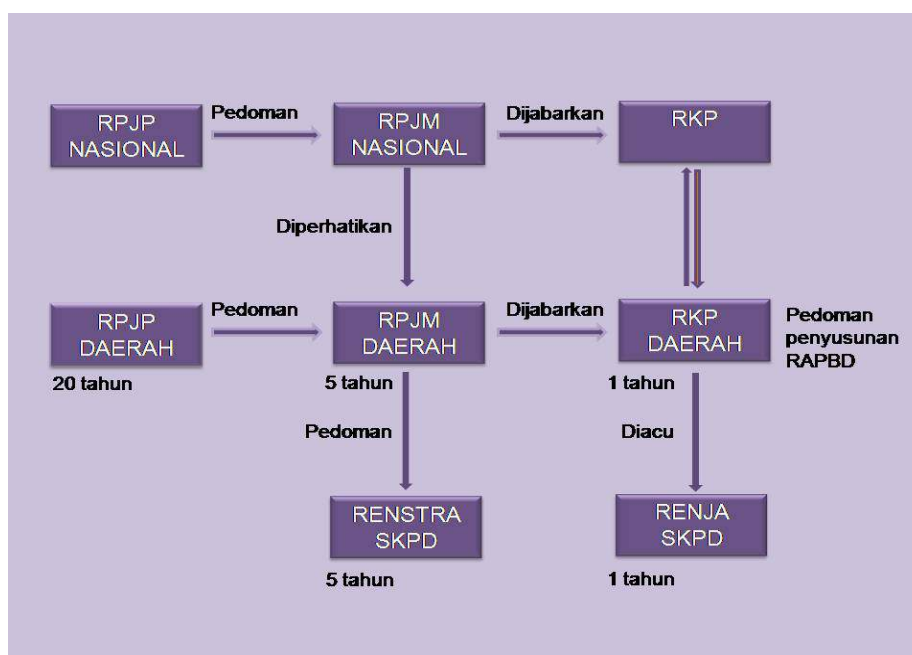
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

## KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Mukomuko sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Rencana Kerja, yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
17. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor        Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Mukomuko Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor    Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
20. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ... Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko**

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Inspektorat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan.

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, antara lain :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

## **1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Inspektorat Daerah, Fungsi Renja Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan Renja Inspektorat Daerah dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

# BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja

pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukannya itu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten

### BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal

RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH**

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Hasilnya dari 9 Program dan 34 Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja 2020, terealisasi sebanyak 9 Program dan 34 kegiatan. Dari alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko setelah akhir tahun anggaran periode 1 Januari 2020 sd 31 Desember 2020, anggaran belanja Inspektorat Daerah adalah sebesar Rp.6.454.808.000,- (sumber: APBDP Kabupaten Mukomuko Tahun 2020) terealisasi Rp.6.050.557.770,- Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.019.804.000,- terealisasi Rp.3.693.002.186,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.445.004.000,- terealisasi Rp.2.357.555.584,-

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Khusus untuk Inspektorat Daerah sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat Daerah menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat Daerah lainnya yang berkaitan.



## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah, yaitu :

### 1. Faktor Internal

- a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan berulang dalam setiap pemeriksaan berkala.
- b. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah, yakni 15 auditor dan 16 P2UPD sedangkan berdasarkan analisis terdahulu seharusnya Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki 98 orang Auditor, hal ini disebabkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektorat.

### 2. Faktor Eksternal

- a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah Daerah yang rata-rata masih ada pada level 1 (*Initial*) dan 2 (*Insfrastructure*) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dalam pelaksanaan diklat teknis kepengawasan.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai Counsultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Mukomuko serta Visi dan Misi Inspektorat Daerah khususnya.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Khusus untuk Inspektorat Daerah sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat Daerah menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat Daerah lainnya yang berkaitan. Berikut Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Inspektorat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Mukomuko

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-	-	-	-	-































No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (output)	Target Renstra OPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Trivulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab							Keterangan																	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	01	02	03	04	05	06	07																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																	
1	02 01 15 45	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Doc	474.351.000	4	94.340.000	1	40.000.000	1	40.000.000					100,00%	40.000.000	100	100	4	134.340.000	50	28																											
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																<b>100</b>	<b>100</b>					<b>50</b>	<b>28</b>																											
<b>Predikat kinerja</b>																<b>SY</b>	<b>SY</b>																																	
V	02 01 15	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan</b>		<b>14.919.329.000</b>		<b>2.967.451.609</b>	<b>100%</b>	<b>1.210.175.000</b>	<b>28%</b>	<b>146.306.000</b>	<b>21%</b>	<b>167.941.500</b>		<b>164.941.500</b>		<b>558.343.000</b>	<b>48,79%</b>	<b>1.210.110.000</b>	<b>49%</b>	<b>100%</b>																													
1	02 01 15 01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.850 LHP	10.344.160.000	766	1.536.540.391	320	808.900.000	5%	43.301.000	15%	119.880.000	18%	147.420.000	61,2%	495.357.000	<b>99,64%</b>	805.958.000	20	100	767	2.342.498.391	41	23																									
2	45 01 15 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	16 LHP	92.931.000	37	92.350.000												-	-	-	37	92.350.000	231	99																									
	02 01 15			115 lhp	588.378.000	10	80.075.000	10	50.000.000	40%	19.760.000	5%	2.625.000	2%	1.050.000	37,9%	18.930.000	84,73%	42.365.000	31	85	11	122.440.000	8	21																									
3	02 01 15 05	Inventarisasi temuan pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan Inventarisasi temuan Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil temuan pemeriksaan	15 Doc	782.750.000	5	273.807.500	3	136.000.000	32%	43.563.000	19%	26.136.500	12%	16.471.500	32,4%	44.056.000	95,76%	130.227.000	45	96	6	404.034.500	40	52																									
4	02 01 15	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang lebih Komprehensif	5 Doc	363.293.000	2	91.301.992	1	-										-	-	-	2	91.301.992	40	25																									
5	02 01 15	Justifikasi serah terima belanja modal seluruh SKPD ke Bupati Mukomuko	Jumlah Pelaksanaan Justifikasi serah terima belanja modal seluruh SKPD ke Bupati Mukomuko	80 Doc	353.400.000	2	17.350.000	1											-	-	-	2	17.350.000	3	5																									
6	02 01 15	Sosialisasi Peraturan tentang kebijakan pengawasan dan pelaporan	Jumlah Sosialisasi Peraturan tentang kebijakan pengawasan dan pelaporan																-	-	-																													
7	02 01 15 11	Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko	Jumlah Dokumen Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko	6 Doc	805.317.000	2	244.913.500	1	29.700.000			87%	25.984.000	12,5%	3.716.000	<b>100,00%</b>	29.700.000	100	100	3	274.613.500	23	34																											
8	02 01 15	Pendataan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdapat Harta Kekayaannya	130 ASN	180.800.000	25	60.000.000	25	48.475.000	51%	24.682.000			49,1%	23.793.000	<b>100,00%</b>	48.475.000	100	100	#REF!	108.475.000	23	60																											
9	02 01 15 12	Pendataan Harta Kekayaannya PNS/ASN	Jumlah PNS/ASN yang terdapat Harta Kekayaannya	1.400 ASN	642.600.000	506	197.948.950	200	25.300.000					95,8%	24.225.000	<b>95,75%</b>	24.225.000	95,75	95,75	507	222.173.950	36	35																											
10	02 01 15	Evaluasi SPI OPD	Presentase peningkatan SPI SKPD	10 %	49.450.000													0,00%	-	-	-																													
			Jumlah dokumen evaluasi SPI OPD	5 doc	347.650.000	1	49.887.276	1	27.450.000			62%	16.900.000	28,8%	7.910.000	<b>90,38%</b>	24.810.000	90	90	1,0	74.697.276	20	21																											
11	02 01 15	Pelaksanaan Whistleblowing System dalam PBJ	Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ	20 Pengaduan	113.000.000	5	36.515.000	5	-									0,00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5,0	36.515.000	25	32																									
12	02 01 15	Klinik Konsultasi	Jumlah OPD yang Konsultasi	20 OPD	255.600.000	20	19.615.000	20	-									0,00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	20,0	19.615.000	100	8																									
		Peningkatan Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	3 Level	67.570.000	3	26.000.000	3	26.000.000	12%	3.000.000			52%	13.500.000	36,5%	9.500.000	<b>100,00%</b>	26.000.000	100	100	3	100																											
		Koordinasi TP4D			199.577.000													0,00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!																													
		Reviu DAK							43.350.000	28%	12.000.000	45%	19.300.000	22%	9.650.000	51,7%	22.400.000	<b>146,14%</b>	63.350.000	146	146																													
		Monitoring dan Evaluasi							15.000.000									100,0%	15.000.000	100	100																													
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																<b>42</b>	<b>68</b>																																	
<b>Predikat kinerja</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>																																	
VI	02 01 16	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Persentase pemenuhan kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>		<b>1.757.810.000</b>		<b>192.200.637</b>	<b>100%</b>	<b>118.000.000</b>	<b>400%</b>	<b>97.334.500</b>	<b>150%</b>	<b>8.110.000</b>		<b>2.025.000</b>		<b>550.000</b>	<b>107.469.500</b>	<b>550</b>	<b>91</b>																														
1	02 01 16 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelaksanaan pengiriman PNS pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	5 Kali	123.050.000	5	110.510											0,00%	-	-	-	5	110.510	100	0,1																									
			Jumlah pengiriman PNS tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	22 kali	1.276.260.000	4	158.795.127	6	100.000.000	7	93.834.500	1	5.560.000					8	99.394.500	81	99	5	258.189.627	23	20																									
2	02 01 16 02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	25 Kali	152.400.000	5	18.295.000	5	18.000.000	1	3.500.000	2	2.550.000	2	2.025.000			5	8.075.000	53	45	7	26.370.000	28	17																									
3	02 01 16 03	Penilaian angka kredit auditor.	Jumlah dokumen PAK Auditor	10 Doc	206.100.000	3	15.000.000	-	-									0,00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3	15.000.000	30	7																									
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>																																	
<b>Predikat kinerja</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>																																	
VII	02 01 17	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>Tersusunnya Program Kegiatan Pengawasan</b>		<b>233.472.000</b>		<b>33.605.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.600.000</b>																																									
1	02 01 17 01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	Jumlah Dokumen Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	6 Doc	83.072.000	2	18.705.000	1	8.600.000				63%		37%	3.168.000	100%	8.600.000	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	2	27.305.000	33	33																										











**TABEL 2.3**  
**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15		16	12	13	14
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.521.182.316		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11.286.182.316	
	INSPEKTORAT DAERAH				7.521.182.316		INSPEKTORAT DAERAH				11.286.182.316	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				5.393.844.640		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				8.036.182.316	
			Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	17 layanan					Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	17 layanan		
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80%					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80%		
			Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	100%					Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	100%		
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	50%					Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	50%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan administrasi umum yang dilaksanakan		260.902.324		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan administrasi umum yang dilaksanakan		500.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15	16	12	13	14	
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	5 Jenis	26.998.455		Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	5 jenis	30.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	10 Jenis	7.999.932		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	10 Jenis	20.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mukomuko	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	6 jenis	29.999.880		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Mukomuko	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	6 jenis	50.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	6.999.603		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	40.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	18.999.500		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	40.000.000	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mukomuko	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	6 jenis	24.967.954		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Mukomuko	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	6 jenis	70.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ke luar Provinsi Bengkulu	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	42 Kali	144.937.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ke luar Provinsi Bengkulu	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	60 kali	250.000.000	APBD
		Kab. Mukomuko	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam	172 Kali		Kab. Mukomuko		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam	200 kali	APBD		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>80%</b>	<b>60.000.000</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>80%</b>	<b>2.200.000.000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Kab. Mukomuko	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	50.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Kab. Mukomuko	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	100.000.000	APBD



NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15	16	12	13	14	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung pendukung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Mukomuko	Jumlah Pengadaan Meubeleur	2	10.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung pendukung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Mukomuko	Jumlah Pengadaan Meubeleur	4 jenis	100.000.000	APBD
							Pembangunan Gedung		1 gedung		2.000.000.000	
							Pembangunan Tempat parkir		1 tempat parkir			
							Pengadaan Kendaraan		1 kendaraan			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan</b>	<b>3 layanan</b>	<b>143.250.000</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan</b>	<b>3 layanan</b>	<b>200.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan M	225	2.250.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Mukomuko	Jumlah Penyediaan Ma	1000	10.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Mukomuko	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	45.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Mukomuko	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	70.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mukomuko	Jumlah Orang Pelayanan Jasa Umum yang mendapatkan Honorarium	8	96.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mukomuko	Jumlah Orang Pelayanan Jasa Umum yang mendapatkan Honorarium	8	120.000.000	APBD
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>	<b>82.545.000</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>	<b>115.000.000</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15		16	12	13	14
	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mukomuko	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pajak yang dibayar	2 jenis	74.545.000		Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Mukomuko	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pajak yang dibayar	2 jenis	100.000.000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mukomuko	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapat Pemeliharaan	2 Jenis	8.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mukomuko	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapat Pemeliharaan	2 Jenis	15.000.000	APBD
	<b>Adminstrasi Keuangan</b>		Jumlah jenis pelayanan administrasi	2 jenis	<b>4.667.022.316</b>		<b>Adminstrasi Keuangan</b>		Jumlah jenis pelayanan administrasi	2 jenis	<b>4.701.182.316</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mukomuko	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	50 orang	4.521.182.316		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mukomuko	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	50 orang	4.521.182.316	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mukomuko	Jumlah pegawai yang melakukan Penatausahaan, pengujian/Verifikasi Keuangan	16 orang	145.840.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Mukomuko	Jumlah pegawai yang melakukan Penatausahaan, pengujian/Verifikasi Keuangan	16 orang	180.000.000	APBD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	50%	<b>150.000.000</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	50%	<b>250.000.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Kab. Mukomuko	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 orang	150.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Kab. Mukomuko	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 orang	250.000.000	APBD
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Pelaporan	100%	<b>30.125.000</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Pelaporan	100%	<b>70.000.000</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15	16	12	13	14	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12.580.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	40.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 dokumen	12.545.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 dokumen	20.000.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja dan Evaluasi Renstra	2 dokumen	5.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja dan Evaluasi Renstra	2 dokumen	10.000.000	APBD
	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>		Jumlah Perangkat Daerah, Puskesmas, Sekolah dan Desa yang dilakukan Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi		<b>1.674.337.676</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>		Jumlah Perangkat Daerah, Puskesmas, Sekolah dan Desa yang dilakukan Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi		<b>2.350.000.000</b>	
			Persentase TL APIP						Persentase TL APIP			
			Persentase TL BPK						Persentase TL BPK			
			Persentase TL Inspektorat Provinsi						Persentase TL Inspektorat Provinsi			
			Persentase Temuan Berulang						Persentase Temuan Berulang			
			Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan						Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan			
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi		<b>1.419.980.000</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi		<b>1.900.000.000</b>	
			Persentase TL APIP						Persentase TL APIP			
			Persentase TL BPK						Persentase TL BPK			
			Persentase TL Inspektorat Provinsi						Persentase TL Inspektorat Provinsi			

NO	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15	16	12	13	14	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Penilaian SPIP	9 Dokumen	500.000.000		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Penilaian SPIP	9 Dokumen	600.000.000	APBD
		Kab. Mukomuko	Jumlah Perangkat Daerah yg dilakukan evaluasi SAKIP	27 OPD				Kab. Mukomuko	Jumlah Perangkat Daerah yg dilakukan evaluasi SAKIP	27 OPD		
		Kab. Mukomuko	Jumlah Laporan pemeriksaan kinerja	179 Laporan				Kab. Mukomuko	Jumlah Laporan audit kinerja	179 Laporan		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Mukomuko		27 Laporan	60.000.000		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Mukomuko		27 Laporan	100.000.000	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIPDA)	1 dokumen	130.000.000		Reviu Laporan Kinerja	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIPDA)	1 dokumen	200.000.000	APBD
		Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen				Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen		
		Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Perencanaan Daerah	8 dokumen				Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Perencanaan Daerah	8 dokumen		
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	140.000.000		Reviu Laporan Keuangan	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	200.000.000	APBD
		Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Penyerapan	4 dokumen				Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Penyerapan annggaran	4 dokumen		
		Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu DAK	4 dokumen				Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Reviu DAK	4 dokumen		
	Pengawasan Desa	Kab. Mukomuko	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	105 Desa	297.200.000		Pengawasan Desa	Kab. Mukomuko	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	105 Desa	400.000.000	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15	16	12	13	14	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pengawasan (6 dokumen)	1 dokumen	150.000.000		Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pengawasan (6 dokumen)	1 dokumen	200.000.000	APBD
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	142.780.000		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	200.000.000	APBD
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>		Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan		<b>254.357.676</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>		Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan		<b>450.000.000</b>	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Mukomuko	jumlah Dokumen Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	4 dokumen	120.000.000		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Mukomuko	jumlah Dokumen Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	4 dokumen	200.000.000	APBD
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Mukomuko	Jumlah Penanganan Kasus Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 dokumen	134.357.676		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Mukomuko	Jumlah Penanganan Kasus Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18 Dokumen	250.000.000	APBD
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		Tingkat Kapabilitas APIP		<b>453.000.000</b>		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		Tingkat Kapabilitas APIP		<b>900.000.000</b>	
			Nilai Monitoring Center Of Prevention						Nilai Monitoring Center Of Prevention			

NO	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15		16	12	13	14
			Persentase Tingkat Kepatuhan ASN (pejabat Eselon III dan IV) dalam penyampaian						Persentase Tingkat Kepatuhan ASN (pejabat Eselon III dan IV) dalam penyampaian laporan			
			Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelenggaran Negara dalam menyampaikan						Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelenggaran Negara dalam menyampaikan			
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>		jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	30 Dokumen	<b>93.000.000</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>		jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	30 Dokumen	<b>200.000.000</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	7 Dokumen	40.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Mukomuko	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	7 Dokumen	100.000.000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen PAK Auditor	22 Dokumen	53.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen PAK Auditor	30 Dokumen	100.000.000	APBD
			Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	1 Dokumen					Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	1 Dokumen		
			fasilitasi koordinasi pengawasan	1 kali					fasilitasi koordinasi pengawasan	1 kali		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15		16	12	13	14
	Pendampingan dan Asistensi		Level Kapabilitas APIP, Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi (PPG), Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdata Harta Kekayaannya, Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya, Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ, Jumlah Dokumen Hasil Survey Penilaian Integratis	Level 3, 4 Dokumen Laporan PPG, 58 orang, 200 orang, 1 Dokumen PMPRB, 4 Dokumen MCP	360.000.000		Pendampingan dan Asistensi		Level Kapabilitas APIP, Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi (PPG), Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdata Harta Kekayaannya, Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya, Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ, Jumlah Dokumen Hasil Survey Penilaian Integratis	Level 3, 4 Dokumen Laporan PPG, 58 orang, 200 orang, 1 Dokumen PMPRB, 4 Dokumen MCP	700.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mukomuko	Nilai Kapabilitas APIP,	level 3	220.000.000		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mukomuko	Nilai Kapabilitas APIP,	level 3	300.000.000	APBD
		Kab. Mukomuko	Jumlah Penyelenggara negara yang melaporkan harta	58 orang				Kab. Mukomuko	Jumlah Penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan	58 orang		
		Kab. Mukomuko	Jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan	200 orang				Kab. Mukomuko	Jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan	200 orang		
		Kab. Mukomuko	Jumlah laporan Monitoring PPG	4 dokumen				Kab. Mukomuko	Jumlah laporan Monitoring PPG	4 dokumen		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN		
1	3	10	9	12	13	14	15	16	12	13	14	
		Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan Rakorwasnas	1 kali				Kab. Mukomuko	Jumlah pelaksanaan Rakorwasnas	1 kali		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Mukomuko	<b>Jumlah Perangkat daerah yang membangun RB</b>	9 Dokumen	50.000.000		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Mukomuko	<b>Jumlah Perangkat daerah yang membangun RB</b>	9 Dokumen	150.000.000	APBD
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Mukomuko	<b>Jumlah Laporan MCP</b>	4 Dokumen	50.000.000		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Kab. Mukomuko	<b>Jumlah Laporan MCP</b>	4 Dokumen	150.000.000	APBD
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		<b>Jumlah Laopran Penegakan Integritas</b>	1 dokumen	40.000.000		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		<b>Jumlah Laopran Penegakan Integritas</b>	1 dokumen	100.000.000	APBD
					<b>7.521.182.316</b>				-		<b>11.286.182.316</b>	

Mukomuko,

September 2021





**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2025	TAHUN ANGGARAN 2026	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Pelaporan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang di laksanakan			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			40%	60%	75%	80%	91%	-	40%	60%	
1	Jumlah Jenis layanan administrasi umum yang dilaksanakan	-		7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	-	7 layanan	7 layanan	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	-		70%	80%	90%	100%	100%	-	70%	80%	
3	Jumlah jenis administrasi perkantoran yang dilaksanakan			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	
4	<b>Persentase sarana dalam kondisi baik</b>			70%	80%	90%	100%	100%	-	70%	80%	
8	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi			179 Laporan	179 Laporan	267 Laporan	179 Laporan	179 Laporan	-	179 Laporan	179 Laporan	
9	Persentase TL APIP			50%	60%	70%	80%	90%	-	50%	60%	
10	Persentase TL BPK			70%	73%	75%	80%	85%	-	70%	73%	

No	Indikator Kinerja Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2025	TAHUN ANGGARAN 2026	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2023	
11	Persentase TL Inspektorat Provinsi			90%	90%	90%	90%	90%	-	90%	90%	
12	Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan			60%	70%	70%	90%	100%	-	60%	70%	
13	jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	
15	Tingkat Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	Level 3	
16	Tingkat Maturitas SPIP			Level 2 +	Level 3	level 3	level 3	level 3	-	Level 2 +	Level 3	
17	Nilai Monitoring Center Of Prevention			50%	60%	70%	80%	90%	-	50%	60%	
18	Persentase Tingkat Kepatuhan ASN (pejabat Eselon III dan IV) dalam penyampaian laporan <del>Kelembagaan</del>			50%	60%	70%	80%	100%	-	50%	60%	
19	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelenggaran Negara dalam menyampaikan Laporan Hasil <del>Kelembagaan</del>			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
20	Nilai Penilaian Mandiri RB			70	72	75	77	77	-	70	72	

Mukomuko,

2021







## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, maka dapat diidentifikasi Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Kabupaten sebagai berikut:

**Daftar Sinkronisasi dan Sinergitas Program Prioritas dalam RKPD  
dengan Program Provinsi serta Nasional Tahun Anggaran 2020**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Nasional</b>
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2.	Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2. Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan	2. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing	3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	5. Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif)	5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
		6. Prioritas Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19	6. Memperkuat Stabilitas PolHukHanKam dan Tranformasi Pelayanan Publik

**Tabel 3.2**  
**IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN**  
**PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021**

KABUPATEN		PROVINSI		NASIONAL	
PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Guru	1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	1. Rehabilitas, Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
	2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan		2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja		2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
	3. Perluasan kesempatan kerja		3. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan		3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
	4. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan		4. Peningkatan akses dan kualitas Kesehatan		4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
	5. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat		5. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak dan distabilitas serta partisipasi pemuda dan olah raga dalam pembangunan		5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi

						6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi					
						7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)					
						8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi					
<b>2.</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial</b>	<b>1.</b>	<b>Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan keluarga miskin</b>	<b>2.</b>	<b>Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan</b>	<b>1.</b>	<b>Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur perkotaan</b>	<b>2.</b>	<b>Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>1.</b>	<b>Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan</b>
		2.	Perlindungan PMKS			2.	Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur strategis			2.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
		3.	Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi social			3.	Peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim			3.	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan
		4.	Pengembangan dan Penguatan Peran Desa dalam pengentasan kemiskinan			4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup			4.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		5.	Pengembangan dan Penguatan							5.	Peningkatan Kualitas Anak,



	Kelembagaan keluarga Miskin				Perempuan Dan Pemuda
					6 Pengentasan Kemiskinan
					7 Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing
3. Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing	1. Pembangunan Sarana dan prasarana strategis	3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	1. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan	3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. <b>Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter</b>
	2. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan		2. Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi		2. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
	3. Peningkatan kualitas lingkungan		3. Peningkatan investasi		3. Memperkuat Moderasi

		pemukiman				Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan an Harmoni Sosial
		4. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana		4. Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan		4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter
		5. Peningkatan konektivitas				
<b>4.</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah</b>	<b>1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan</b>	<b>4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>1. Peningkatan Akuntabilitas serta Penataan hukum dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>4. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	<b>1. Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>
		2. Peningkatan produktifitas pangan		2. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penataan birokrasi		2. Infrastruktur Ekonomi
		3. Peningkatan realisasi investasi		3. Peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		3. Infrastruktur Perkotaan
		4. Peningkatan Produktifitas UMKM		4. Pengembangan wawasan kebangsaan serta penegakan demokrasi, keamanan dan ketertiban		4. Energi Dan Ketenagalistrikan
		5. Pengembangan sektor pariwisata				5. Transformasi Digital
<b>5.</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>1. Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah</b>	<b>5. Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan</b>	<b>1. Pelestarian, Pemajuan serta inklusifitas budaya dan pemahaman sejarah</b>	<b>5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan</b>	<b>1. Peningkatan kualitas Lingkungan hidup</b>

		Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif	daerah	Bencana, Dan Perubahan Iklim	
	2. Pemanfaatan IPTEK dalam tata Kelola pemerintahan yang inovatif		2. Peningkatan Akseibilitas, Amenitas dan Atraksi Parawisata daerah		2 Peningkatan ketahanan . Bencana dan iklim
	3. Pengembangan kualitas SDM aparatur		3. Pengembangan ekonomi kreatif		3 Pembangunan rendah karbon
	4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan		4. Pengembangan desa Wisata dan Desa Digital		
		6. <b>Prioritas Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19</b>		6. <b>Memperkuat Stabilitas PolHukHanKam dan Tranformasi Pelayanan Publik</b>	1. <b>Konsolidasi Demokrasi</b>
					2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
					3 Penegakan . Hukum Nasional
					4 Reformasi . Birokrasi Dan Tata Kelola
					5 Menjaga Stabilitas . Keamanan Nasional

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH**

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dengan tugas utama membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Pengawasan Urusan Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata kelola Kinerja OPD;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Pembinaan serta Pengawasan Internal;

#### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah (OPD);
2. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan;
3. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal;
4. Peningkatnya persentase kasus pengaduan dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tertangani;
5. Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP Daerah;
6. Meningkatnya nilai pada area intervensi APIP dan sub Indikator Pengawasan pada Area intervensi MCP;

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko, maka pada tahun 2022 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 Program 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, maka pada tahun 2022 Inspektorat Daerah

melaksanakan 3 Program dan 11 Kegiatan, 33 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
Kegiatan	<b>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
Sub Kegiatan	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan	<b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
Sub Kegiatan	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	<b>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	<b>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
Sub Kegiatan	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan	<b>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan	<b>6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
Sub Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan	<b>7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>PROGRAM</b>	<b>2. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>
Sub Kegiatan	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
<b>Kegiatan</b>	<b>2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>

Sub Kegiatan	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
	2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
<b>PROGRAM</b>	<b>3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>
Sub Kegiatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
<b>Kegiatan</b>	<b>2. Pendampingan dan Asistensi</b>
Sub Kegiatan	1. Pendampingan dan Asistensi Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
	2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	4. Pendampingan, Asistensi, dan verifikasi Penegakkan Integritas

### 3.4 Adaptasi Tatahan Kehidupan Baru

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur.

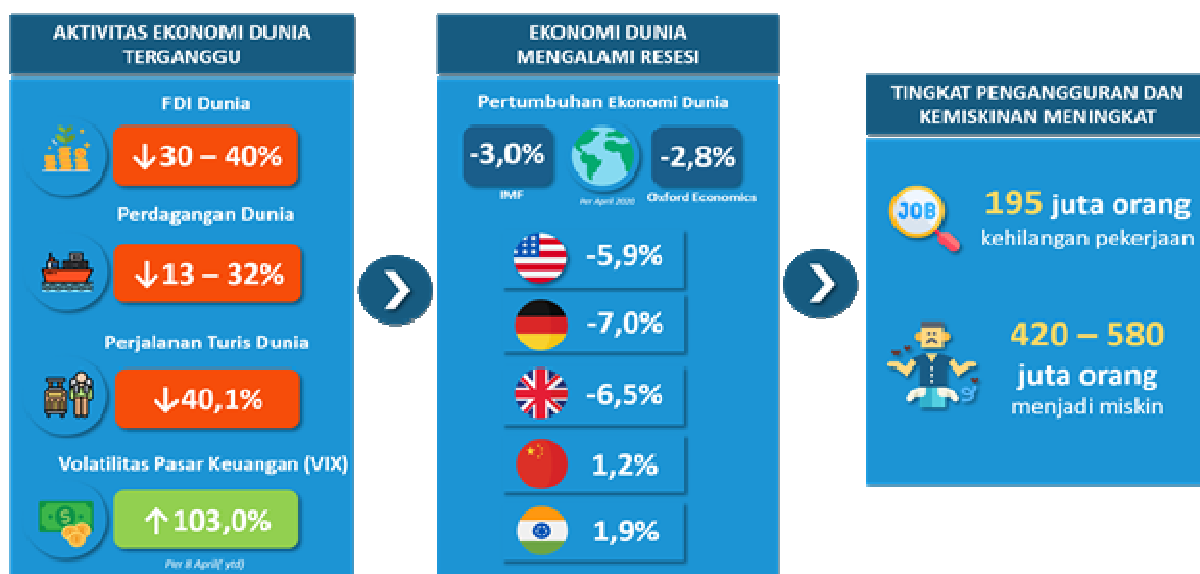
Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat

kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 4.). Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen.

**Gambar 4.1**  
**Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia**



Sumber:Kementerian PPN/Bappenas (diolah),2020

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US \$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.



Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai

upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses transformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid-19.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital (Gambar 2.5). Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja

transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam

tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

### **3.5 Prioritas Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko**

Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya penanganan secara cepat dan komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holder, untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait terkait penanganan Pandemi Covid-19 yaitu:

1. Keputusan Bupati mukomuko Nomor : 100-184 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
2. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease di Kabupaten Mukomuko;
3. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-208 Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
4. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19;
5. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomukomo telah melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan

tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

1. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;
2. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net.

### **3.6 Protokol Menghadapi Tatanan New Normal**

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, kini virus corona sudah menjadi pandemi global dan menyebar hampir di seluruh dunia. Saat ini, sudah ada 213 (dua ratus tiga belas) negara dan wilayah yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Walaupun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Covid-19.

Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Ada ketentuan khususnya di Indonesia bisa luwes penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Indonesia harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi produktifitas dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Untuk mendukung keberlangsungan seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19, yang mengatur :

1. Protokol Di Tempat Bekerja dan Perjalanan Dinas/Bisnis;
  - a. Protokol di tempat bekerja;
  - b. Protokol Pada Perjalanan Dinas/Bisnis
2. Protokol Pada Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah;
3. Protokol Pada Layanan Pendidikan dan Sekolah;
  - a. Protokol Pada Masa Transisi
  - b. Protokol Normal Baru
4. Protokol Pada Layanan Kesehatan;
5. Protokol Pada Pusat Keramaian (pasar dan pertokoan);

6. Protokol Di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik);
7. Protokol Pada Penyelenggaraan Acara (pernikahan, konser dan acara olah raga);
8. Protokol Pada Transportasi Publik.

Penerapan tatanan normal baru produktif dan aman corona virus disease di Kabupaten Mukomuko mengacu pada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan penyelenggaraan pembelajaran secara daring maupun tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Selama masa transisi, lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap bagi lembaga/satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS dan merasa siap dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga lembagal/satuan pendidikan;
  - b. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing) sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 2022**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Adapun Rumusan Rencana Program Dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2022 selengkapnya akan di tampilkan pada tabel 4.1 berikut ini :



**TABEL 4.1**  
**RENCANA RUMUSAN PROGRAM KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUK TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU**

NO	KODE REKENING				PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2				3	9	10	12	13	14	15	16	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.521.182.316			7.600.224.681	
6					INSPEKTORAT DAERAH				7.521.182.316			7.600.224.681	
6	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				5.393.844.640			5.395.887.005	
						Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan		17 layanan				17 layanan	
						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		80%				80%	
						Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun		100%				100%	
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		50%				50%	
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan administrasi umum yang dilaksanakan			260.902.324			263.902.324	
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	Kab. Mukomuko	5 Jenis	26.998.455	APBD		5 Jenis 29.998.455	
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Kab. Mukomuko	10 Jenis	7.999.932	APBD		10 Jenis 7.999.932	



NO	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU				
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	9	10	12	13	14	15	16				
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Mukomuko	6 jenis	29.999.880	APBD		6 jenis	29.999.880
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mukomuko	3 Jenis	6.999.603	APBD		3 Jenis	6.999.603
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Mukomuko	2 Jenis	18.999.500	APBD		2 Jenis	18.999.500
6	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	Kab. Mukomuko	6 jenis	24.967.954	APBD		6 jenis	24.967.954
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	ke luar Provinsi Bengkulu	42 Kali	144.937.000	APBD		42 Kali	144.937.000
						Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kab. Mukomuko	172 Kali		APBD		172 Kali	
6	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>		<b>80%</b>	<b>60.000.000</b>			<b>80%</b>	<b>60.000.000</b>
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mukomuko	4	50.000.000	APBD		4	50.000.000
6	01	01	2,07	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung pendukung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Meubeleur	Kab. Mukomuko	2	10.000.000	APBD		2	10.000.000
6	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan</b>		<b>3 layanan</b>	<b>143.250.000</b>			<b>3 layanan</b>	<b>143.250.000</b>
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai	Kab. Mukomuko	225	2.250.000	APBD		225	2.250.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU				
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	9	10	12	13	14	15	16				
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Mukomuko	12	45.000.000	APBD		12	45.000.000
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pelayanan Jasa Umum yang mendapatkan Honorarium	Kab. Mukomuko	8	96.000.000	APBD		8	96.000.000
6	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dalam kondisi baik</b>		<b>80%</b>	<b>82.545.000</b>			<b>80%</b>	<b>72.545.000</b>
6	01	01	2,09	01	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pajak yang dibayar	Kab. Mukomuko	2 jenis	74.545.000	APBD		2 jenis	64.545.000
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapat Pemeliharaan	Kab. Mukomuko	2 Jenis	8.000.000	APBD		2 Jenis	8.000.000
6	01	01	2,02		<b>Adminstrasi Keuangan</b>	Jumlah jenis pelayanan administrasi		2 jenis	<b>4.667.022.316</b>			2 jenis	<b>4.676.064.681</b>
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kab. Mukomuko	50 orang	4.521.182.316	APBD		50 orang	4.530.224.681
6	01	01	2,02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan Penatausahaan, pengujian/Verifikasi Keuangan	Kab. Mukomuko	16 orang	145.840.000	APBD		16 orang	145.840.000
6	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		50%	<b>150.000.000</b>			50%	<b>150.000.000</b>
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mukomuko	12 orang	150.000.000	APBD		12 orang	150.000.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	9	10	12	13	14	15	16	
6	01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Pelaporan		100%	<b>30.125.000</b>			100%	<b>30.125.000</b>
6	01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mukomuko	3 dokumen	12.580.000	APBD		3 dokumen	12.580.000
6	01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Mukomuko	3 dokumen	12.545.000	APBD		3 dokumen	12.545.000
6	01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja dan Evaluasi Renstra	Kab. Mukomuko	2 dokumen	5.000.000	APBD		2 dokumen	5.000.000
6	01.02.02	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	Jumlah Perangkat Daerah, Puskesmas, Sekolah dan Desa yang dilakukan Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi			<b>1.674.337.676</b>				<b>1.704.337.676</b>
			Persentase TL APIP							
			Persentase TL BPK							
			Persentase TL Inspektorat Provinsi							
			Persentase Temuan Berulang							
			Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
6	01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi							
			Persentase TL APIP			<b>1.419.980.000</b>				<b>1.429.980.000</b>

NO	KODE REKENING					PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2					3	9	10	12	13	14	15	16	
							Persentase TL BPK							
							Persentase TL Inspektorat Provinsi							
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian SPIP	Kab. Mukomuko	9 Dokumen	500.000.000	APBD		9 Dokumen	510.000.000	
						Jumlah Perangkat Daerah yg dilakukan evaluasi SAKIP	Kab. Mukomuko	27 OPD				27 OPD		
						Jumlah Laporan audit kinerja	Kab. Mukomuko	2 Laporan audit Kinerja				2 Laporan audit Kinerja		
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Mukomuko	162 Laporan	60.000.000	APBD		162 Laporan	60.000.000	
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIPDA)	Kab. Mukomuko	1 dokumen	130.000.000	APBD		1 dokumen	130.000.000	
						Jumlah Dokumen Reviu Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Kab. Mukomuko	1 dokumen				1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Reviu Perencanaan Daerah	Kab. Mukomuko	8 dokumen				8 dokumen		
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mukomuko	1 dokumen	140.000.000	APBD		1 dokumen	140.000.000	
						Jumlah Dokumen Reviu Laporan Penyerapan anggaran	Kab. Mukomuko	4 dokumen				4 dokumen		
						Jumlah Dokumen Reviu DAK	Kab. Mukomuko	4 dokumen				4 dokumen		
6	01	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Mukomuko	105 Desa	297.200.000	APBD		105 Desa	297.200.000	

NO	KODE REKENING					PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2					3	9	10	12	13	14	15	16	
6	01	02	2,01	06		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pengawasan (Saberpungli)	Kab. Mukomuko	1 dokumen	150.000.000	APBD		1 dokumen	150.000.000
6	01	02	2,01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Pemeriksaan APIP	Kab. Mukomuko	4 Dokumen	142.780.000	APBD		4 Dokumen	142.780.000
6	01	02	2,02			<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan			<b>254.357.676</b>				274.357.676
6	01	02	2,02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	jumlah Dokumen Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Kab. Mukomuko	4 dokumen	120.000.000	APBD		4 dokumen	120.000.000
6	01	02	2,02	02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penanganan Kasus Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Mukomuko	10 dokumen	134.357.676	APBD		10 dokumen	154.357.676
6	01	03				<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Tingkat Kapabilitas APIP			<b>453.000.000</b>				<b>500.000.000</b>
							Nilai Monitoring Center Of Prevention							
							Persentase Tingkat Kepatuhan ASN (pejabat Eselon III dan IV) dalam penyampaian laporan Harta Kekayaan							
							Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelenggaran Negara dalam menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan							



NO	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU			
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	9	10	12	13	14	15		16		
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP, Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi (PPG), Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdata Harta Kekayaannya, Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya, Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ, Jumlah Dokumen Hasil Survey Penilaian Integratis					Level 3, 4 Dokumen Laporan PPG, 58 orang, 200 orang, 1 Dokumen PMPRB, 4 Dokumen MCP	405.000.000
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kapabilitas APIP, Jumlah Penyelenggara negara yang melaporkan harta kekaayaan Jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan Jumlah laporan Monitoring PPG Jumlah pelaksanaan Rakorwasnas	Kab. Mukomuko Kab. Mukomuko Kab. Mukomuko Kab. Mukomuko Kab. Mukomuko	level 3 58 orang 200 orang 4 dokumen 1 kali	220.000.000	APBD	level 3 58 orang 200 orang 4 dokumen 1 kali	250.000.000
6	01	03	2,02	01	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang membangun RB	Kab. Mukomuko	9 Dokumen	50.000.000	APBD	9 Dokumen	55.000.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	9	10	12	13	14	15	16	
6	01.03	2,02.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Mukomuko	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	60.000.000
6	01.03	2,02.03	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		1 dokumen	40.000.000	APBD		1 dokumen	40.000.000
<b>JUMLAH</b>						<b>7.521.182.316</b>				<b>7.600.224.681</b>

Mukomuko, September 2021





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Inspektorat Daerah disusun dengan menyesuaikan antara Renstra Tahun 2016-2021 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 agar dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di Inspektorat Daerah.

Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-indikator kinerja Program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan Program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pada tahun 2022 terdapat 3 (Tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh tiga) sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Mukomuko,  
Inspektur,

2021

**A . HALIM, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196809211994031006